



Peran Industri Pertahanan dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional (Perspektif Ekonomi Pertahanan)

Tumount Fride¹, Mochamad Achnaf²

^{1,2}Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: deje.tumount@gmail.com

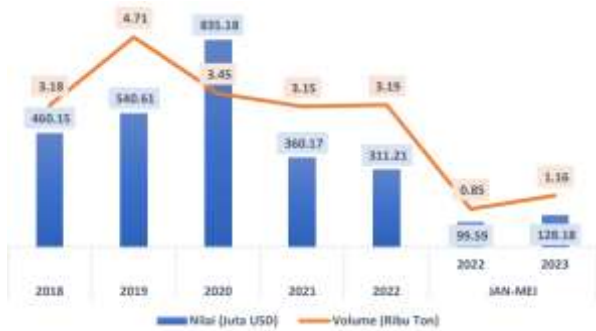
Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-08-07 Revised: 2024-09-22 Published: 2024-10-03 Keywords: <i>Defense Industry;</i> <i>GDP;</i> <i>National Resilience.</i>	Indonesia's defense industry plays an important role in supporting national resilience and economic growth. This journal review examines the contribution of the defense sector to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) and its effects on the national economy, including job creation and technological innovation. Through policy analysis such as Law Number 16 of 2012 and the establishment of the Defense Industry Policy Committee (KKIP), the journal author can evaluate the influence of international cooperation in technology transfer on technological independence. Investment in modernization and development of defense equipment not only increases defense capabilities but also spurs economic growth through related industrial activities. Government policies in providing fiscal and non-fiscal incentives have facilitated increased domestic production and export capacity, reduced dependence on imports, and strengthened Indonesia's position in the global market. So the results of this journal writing show that the defense industry is an important pillar in the national economic strategy that can strengthen security and advance the national economy.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-08-07 Direvisi: 2024-09-22 Dipublikasi: 2024-10-03 Kata kunci: <i>Industri Pertahanan;</i> <i>PDB;</i> <i>c.</i>	Industri pertahanan Indonesia berperan penting dalam mendukung ketahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Penulisan jurnal ini mengkaji terkait dengan kontribusi sektor pertahanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan efeknya terhadap ekonomi nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja dan inovasi teknologi. Melalui analisis kebijakan seperti Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2012 dan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) penulis jurnal dapat mengevaluasi pengaruh kerjasama internasional dalam transfer teknologi terhadap kemandirian teknologis. Investasi dalam modernisasi dan pengembangan alutsista tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan tetapi juga memacu pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan industri terkait. Kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif fiskal dan non fiskal telah memfasilitasi peningkatan produksi domestik dan kapasitas ekspor, mengurangi ketergantungan impor, dan memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global. Sehingga hasil penulisan jurnal ini menunjukkan bahwa industri pertahanan adalah pilar penting dalam strategi ekonomi nasional yang dapat memperkuat keamanan serta memajukan perekonomian nasional.

I. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan negara. Instansi TNI wajib mempunyai kekuatan dan kemampuan yang optimal dalam merancang segala hal yang berkaitan dengan kenegaraan, seperti merancang strategis kenegaraan yang mempunyai jangka lima tahun yang sesuai dengan sistem dan kebijakan nasional, kemampuan negara, situasi lingkungan strategis global, regional maupun nasional. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut TNI perlu dibekali kemampuan teknologi, mengingat penggunaan teknologi di tubuh TNI dapat mempengaruhi penggunaan perlengkapan Alat Utama Sistem Senjata

(Alutsista), hal ini dikarenakan dalam sistem pertahanan negara dibutuhkan teknologi yang dapat dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu 5-10 tahun kedepan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional negara.

Menurut Kementerian Perdagangan (2023), Indonesia melakukan impor alutsista dari tahun ke tahun nilainya naik turun. Hal ini bisa dilihat pada periode dari tahun 2018 - 2022, impor alutsista tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu senilai USD 835,18 juta atau sebagai 3,45 ribu ton. Kemudian setelah tahun 2020 impor alutsista mengalami penurunan ke angka USD 311,21 juta hingga tahun 2022. Kemudian pada pertengahan tahun 2023, impor alutsista mengalami kenaikan yaitu senilai USD 128,18 juta.



Gambar 1. Nilai dan Volume Impor Alutsista Indonesia Periode 2018-2023

Sumber: BPS (diolah PDSI Kementerian Perdagangan)

Meskipun angka impor alutsista masih tinggi dan tidak sebanding dengan ekspor, namun tidak menghentikan langkah pemerintah untuk mencapai kemandirian industri pertahanan. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki target pada tahun 2029 dapat memproduksi alutsista secara mandiri dan untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2010 Indonesia mendirikan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pada saat Kabinet Indonesia Bersatu I di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Didirikannya KKIP selaras dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 dalam upaya untuk mengembalikan kemampuan Industri Pertahanan Nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia dalam pembuatan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan (Alpalhankam) buatan luar negeri. Adanya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2012 dapat memberikan peluang besar bagi industri pertahanan, khususnya bagi Indonesia yang akan menjadi akselerator bagi pemberdayaan dan pertumbuhan industri pertahanan. Sehingga usaha untuk membangun kemandirian Industri Pertahanan menjadi sangat penting bagi Ekonomi Pertahanan hal ini dikarenakan angka pembuatan dan pembelian peralatan militer yang sangat mahal.

Pada tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp. 70,9 Triliun diperuntukan untuk Alutsista dan pada tahun 2024 rencana APBN untuk alutsista sebesar Rp. 43,02 Triliun. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 2022 ditemukan kelemahan Industri Pertahanan sehubungan dengan Ekonomi Pertahanan yaitu *pertama* adanya stagnasi alokasi anggaran pertahanan sebesar 0.8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). *Kedua* dominasi BUMN dalam ekosistem Industri

Pertahanan Indonesia yang belum menunjukkan adanya helix dan rantai pasok dalam Industri Pertahanan Indonesia. *Ketiga* kecilnya alokasi untuk *research and development* dalam Industri Pertahanan sehingga tidak memungkinkan dilakukannya adopsi bahkan lompatan teknologi. *Keempat* tidak adanya *economies of scale* dalam beberapa alutsista yang menjadi keinginan utama Indonesia untuk berkembang.

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis proses dan dampak dari pengembangan industri pertahanan di Indonesia terhadap kemandirian nasional dalam konteks ekonomi pertahanan. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memahami bagaimana industri pertahanan tidak hanya memperkuat kapasitas militer suatu negara tetapi juga memainkan peran kritikal dalam ekonomi nasional melalui berbagai mekanisme ekonomi dan teknologi.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena dalam konteks kebijakan industri pertahanan Indonesia dengan melihat secara mendalam pada data yang ada tanpa mengubah lingkungan atau kondisi subjek penulisan jurnal. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang kompleksitas dan dinamika kebijakan pertahanan yang sedang berlangsung, serta dampaknya terhadap ekonomi nasional. Data akan dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai jurnal yang telah diterbitkan, laporan pemerintah, serta publikasi resmi lainnya yang relevan dengan topik penulisan jurnal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Industri Pertahanan terhadap PDB dan Penciptaan Lapangan Kerja

Dalam penulisan jurnal yang dilakukan oleh Suryacipta (2020) mengatakan bahwa kontribusi industri pertahanan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan aspek penting dalam diskusi tentang pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional. Meskipun tidak secara eksplisit diuraikan dalam persentase PDB yang berasal dari industri pertahanan, sektor manufaktur yang mencakup industri pertahanan secara signifikan berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Pada tahun 2020, sektor manufaktur

tur menyumbang sekitar 20% dari PDB Indonesia, hal ini merupakan sebuah angka yang menunjukkan pentingnya industri dalam struktur ekonomi nasional.

Sementara itu, upaya Indonesia dalam memodernisasi dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap ekonomi. Investasi yang dilakukan dalam rangka pengadaan dan pengembangan alutsista tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan aktivitas industri terkait. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi neraca perdagangan dan meningkatkan PDB nasional.

Adanya kebijakan pemerintah seperti yang diwakili oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, memainkan peran vital dalam mendorong dan mendukung pertumbuhan industri pertahanan. Dengan memberikan kerangka hukum yang jelas dan dukungan politik, pemerintah berusaha untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor ini. Inisiatif seperti pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menunjukkan komitmen serius untuk mengembangkan industri pertahanan yang *robust*, yang tidak hanya meningkatkan keamanan nasional tetapi juga kontribusi industri terhadap ekonomi secara keseluruhan (The Jakarta Post, 2023).

Pada penulisan jurnal diatas menunjukan bahwa Industri pertahanan Indonesia, sebagai bagian integral dari sektor manufaktur, memainkan peran strategis dalam ekonomi nasional dengan menyumbang sekitar 20% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020. Selain itu, investasi dalam modernisasi dan pengembangan kapabilitas pertahanan, termasuk pengadaan dan pengembangan alutsista, tidak hanya memperkuat keamanan nasional tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan aktivitas industri yang berkaitan.

B. Dampak Transfer Teknologi pada Kemandirian Nasional

Transfer teknologi dalam rangka kerjasama pertahanan internasional memiliki peranan penting untuk meningkatkan kemandirian teknologi suatu negara. Dalam konteks

Indonesia, kerjasama ini dilakukan melalui berbagai kesepakatan bilateral dengan negara-negara yang memiliki teknologi pertahanan maju. Tujuannya tidak hanya untuk memperoleh peralatan militer, tetapi juga untuk mengasimilasi pengetahuan teknologi yang dapat diproduksi dan dikembangkan lebih lanjut di dalam negeri. Menurut Perkasa (2018) dalam Jurnal Teknologi Pertahanan, kolaborasi semacam ini telah memberikan dorongan signifikan bagi perusahaan-perusahaan domestik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam merancang dan memproduksi alutsista canggih yang sebelumnya bergantung pada impor.

Melalui regulasi dan insentif yang sesuai, pemerintah bisa memfasilitasi dan mempercepat proses integrasi teknologi baru ke dalam sistem produksi nasional. Ini termasuk memberikan bantuan finansial, fasilitas pajak dan dukungan riset serta pengembangan. Sebuah artikel di The Jakarta Post (2020) menyoroti bagaimana kebijakan ini telah berhasil meningkatkan kapasitas lokal dalam memproduksi berbagai jenis alutsista, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga mulai diekspor ke pasar internasional sehingga didapati adanya peningkatan kemandirian teknologi dan ekonomi. Dampak jangka panjang dari transfer teknologi ini terlihat dalam penguatan infrastruktur pertahanan nasional dan kemampuan inovasi dalam negeri. Hal ini, sebagaimana ditegaskan oleh Smith (2019), bukan hanya meningkatkan keamanan nasional tetapi juga mempromosikan industri pertahanan sebagai salah satu sektor penting dalam ekonomi nasional. Dengan memastikan adanya aliran teknologi yang konstan dan adaptasi yang efektif, Indonesia tidak hanya meningkatkan kemandirian dalam bidang pertahanan, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemain global yang mampu bersaing dalam industri teknologi tinggi.

Dengan demikian, transfer teknologi dalam kerjasama pertahanan internasional merupakan strategi krusial bagi Indonesia dalam mengembangkan kemandirian teknologi dan memperkuat infrastruktur pertahanan nasional. Melalui kolaborasi dengan negara-negara yang memiliki teknologi pertahanan maju, Indonesia tidak hanya memperoleh peralatan militer yang canggih tetapi juga dapat memberikan fasilitasi asimilasi

pengetahuan dan pengembangan kapasitas industri domestik untuk produksi alutsista. Kebijakan pemerintah yang mendukung integrasi teknologi melalui insentif, dukungan riset dan pengembangan, serta kemudahan regulasi telah memberikan dampak signifikan pada peningkatan produksi domestik dan kemampuan ekspor. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap impor tetapi juga meningkatkan profil Indonesia sebagai negara yang mampu bersaing dalam pasar pertahanan global, menunjukkan transformasi signifikan dari konsumen menjadi produsen teknologi pertahanan yang inovatif dan mandiri.

C. Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Pertumbuhan Industri Pertahanan

Kebijakan pemerintah memiliki peran krusial dalam mempengaruhi pertumbuhan dan pengembangan industri pertahanan. Melalui berbagai kebijakan, seperti insentif pajak, subsidi dan juga investasi dalam infrastruktur, pemerintah berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan pertahanan domestik untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, program-program yang didesain untuk mendukung R&D dalam teknologi pertahanan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi lokal tetapi juga memperkuat kemandirian teknologi. Menurut Smith dan Wesson (2017), kebijakan ini telah berhasil meningkatkan output industri pertahanan di beberapa negara, dengan memberikan fondasi yang kuat untuk inovasi dan pengembangan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar global.

Lebih lanjut, kebijakan pemerintah dalam bentuk dukungan non fiskal, seperti regulasi yang memudahkan transfer teknologi dan kerjasama internasional, juga vital dalam meningkatkan kompetensi industri pertahanan. Efektivitas kebijakan tersebut dapat dilihat dari peningkatan ekspor alutsista, yang tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam kompetisi pasar internasional tetapi juga dalam memenuhi standar internasional. Dalam studi mereka, Lee dan Nguyen (2019) menekankan bahwa kebijakan pemerintah yang proaktif dan adaptif terhadap tren pasar global dan teknologi baru adalah kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif industri pertahanan dalam ekonomi global.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Suryacipta (2020) mengatakan kontribusi signifikan dari industri pertahanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menyoroti integrasi sektor ini dalam struktur ekonomi nasional yang lebih luas. Industri pertahanan tidak hanya memperkuat kapasitas militer Indonesia tetapi juga memainkan peran penting dalam memajukan perekonomian negara. Investasi dalam modernisasi dan pengembangan kapasitas pertahanan seperti pengadaan dan pengembangan alutsista, berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan aktivitas industri terkait. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan industri pertahanan, seperti yang ditandai oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, membuktikan pentingnya sektor pertahanan dalam agenda ekonomi nasional.

Kerjasama internasional dalam transfer teknologi juga memainkan peran vital dalam meningkatkan kemandirian teknologi negara. Melalui kesepakatan bilateral dengan negara-negara yang memiliki kemajuan teknologi pertahanan, Indonesia tidak hanya memperoleh alutsista canggih tetapi juga pengetahuan yang mendukung pengembangan industri pertahanan domestik. Lebih lanjut Perkasa (2018) menunjukkan bahwa kerjasama semacam ini telah memberi dorongan signifikan bagi perusahaan-perusahaan domestik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam merancang dan memproduksi alutsista canggih. Hal ini secara langsung mendukung agenda pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan juga memperkuat kemandirian nasional dalam bidang pertahanan.

Sejalan dengan upaya-upaya ini, dukungan pemerintah melalui berbagai insentif fiskal dan non fiskal seperti fasilitasi pembiayaan, insentif pajak dan kebijakan yang mendukung R&D dapat mempercepat integrasi teknologi dan inovasi dalam produksi alutsista. Menurut The Jakarta Post (2020), kebijakan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga membuka peluang ekspor alutsista, yang menunjukkan peningkatan kompetensi dan kemandirian ekonomi. Melalui berbagai mekanisme ekonomi dan teknologi, industri pertahanan Indonesia bukan hanya berkontribusi pada keamanan nasional tetapi juga

mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan inovasi industri.

Kesimpulannya dari penulisan jurnal ini adalah dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah yang kuat terhadap industri pertahanan Indonesia, dapat memainkan peran strategis dalam meningkatkan ketahanan nasional dan ekonomi pertahanan. Inisiatif seperti pembentukan KKIP dan legislasi yang mendukung pembangunan dan kemandirian industri pertahanan nasional, tidak hanya memperkuat pertahanan tetapi juga membantu Indonesia dalam menjalankan peran aktif dalam perekonomian global sebagai produsen teknologi pertahanan yang inovatif dan mandiri.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Peran Industri Pertahanan dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional (Perspektif Ekonomi Pertahanan).

DAFTAR RUJUKAN

- Ariani, R. A., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (2023). Peran Ekonomi Dalam Meningkatkan Kemandirian Pertahanan Negara Melalui Konsep Sishankamrata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 379-382.
- Budiman, A., & Kolega, M. (2021). Pembangunan Kekuatan Minimum Komponen Utama Pertahanan Negara di Era New Normal. *Jurnal Strategi Nasional*, 6(2), 55-75.
- Fitri, A. (2023). Urgensi Penambahan Anggaran Pertahanan Tahun 2024. *Info Singkat*, XV (24-II), P3DI-Desember-2023, 1-4. Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
- Irwanto, H. Y., Mariani, L., & Sarjito, A. (2022). Evaluasi Industri Pertahanan dalam rangka Kemandirian Alutsista dengan Bercemin pada Industri Pertahanan Negara Maju. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 10(1), 1-5.
- Komite Kebijakan Industri Pertahanan. (2019). Sejarah. Diakses dari <https://www.kkip.go.id/sejarah/>
- Lee, J., & Nguyen, T. (2019). *Global Defense Market Trends and Impacts on National Security*. International Review of Defense Acquisition.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2022). *Kelemahan Industri Pertahanan Indonesia: Stagnasi Alokasi Anggaran, Ekosistem Industri, Penulisan jurnal dan Pengembangan serta Skala Ekonomi*. Diakses dari <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1698-kelemahan-industri-pertahanan-Indonesia-stagnasi-alokasi-anggaran-ekosistem-industri-penulisan-jurnal-dan-pengembangan-serta-skala-ekonomi>
- Perkasa, A. (2018). *Impact of International Defense Technology Transfer on Domestic Capabilities*. Jurnal Teknologi Pertahanan.
- Smith, J., & Wesson, R. (2017). *The Role of Government Policies in Supporting the Defense Industry: An Economic Analysis*. Journal of Defense Economics.
- Surya, A. et al. (2022). Kemandirian Industri Pertahanan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 12(1), 97-110.
- The Jakarta Post. (2020). *From weapons procurement to defense investment*. Diakses dari [\[https://www.thejakartapost.com/academia/2021/11/07/from-weapons-procurement-to-defense-investment.html\]](https://www.thejakartapost.com/academia/2021/11/07/from-weapons-procurement-to-defense-investment.html).
- Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal. (2023). *Realisasi Impor Alutsista Indonesia 2018-2023 (Januari-Mei)*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://hero.kemendag.go.id>